

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SE-KARESIDENAN
SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2005-2007**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

DWI TURASYANI

B 200 050 340

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi yang mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan tetapi semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keimanan.

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten atau Kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pemerintah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi. Asas dekonsentrasi dari asas tugas pembantuan, maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota sebagai Daerah otonom. Selain itu, Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah proporsional.

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi pada profit saja melainkan juga

melakukan pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana Pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam roda Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan yang mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya menggunakan satu ukuran. Oleh karena itu, perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang-kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002:299).

Analisis keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio

keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan Daerah dalam menghargai penyelenggaraan otonomi Daerah serta dapat melihat pertumbuhan perkembangan pendanaan pendapatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Dengan berdasarkan pada ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka penulis mengambil judul : **”ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SE-KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2005-2007”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka, dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana kinerja keuangan suatu pemerintah daerah yang ada di daerah Kabupaten se-Karesidenan Surakarta?

C. Pembatasan Masalah

Peneliti hanya menekankan pada permasalahan mengenai penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah di Daerah se-Karesidenan Surakarta selama kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2005 sampai tahun 2007.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten se-Karesidenan Surakarta yang meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Sukoharjo dengan tahun Anggaran 2005-2007
2. untuk mengetahui kinerja keuangan dari masing-masing Kabupaten.se-Karesidenan Surakarta

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi maupun bahan pertimbangan berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara Ekonomis, Efisien, dan Efektif.

2. Bagi Peneliti

Peneliti ini dapat memberikan pengalaman belajar dan tambahan pengetahuan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang diteliti, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

3. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai gambaran sejauh mana perbandingan dan perkembangan kinerja keuangan di Daerah se-Karesidenan Surakarta, penelitian ini juga sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis yaitu sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian yang meliputi akuntansi sektor publik, tinjauan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengukuran kinerja keuangan daerah, analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup gambaran umum pemerintah daerah di Kabupaten se-Karesidenan Surakarta, dan hasil analisis rasio.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran.